



Sirkulasi Pertumbuhan Output Terhadap Transformasi Keuangan Public Di Indonesia Periode 2014-2023

Amanda Enggelia Purba^{1*}, Mela Zahrani², Widya Arsani Malau³, Teuku Zulkarnain⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2014-2023. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. PDB, yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi, dan IPM, yang mengukur kualitas pembangunan manusia, merupakan dua indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data tahunan dan analisis Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah, PDB, dan IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB dan IPM. Meskipun pengeluaran pemerintah berperan dalam perekonomian, pengaruhnya terhadap PDB dan IPM cenderung terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti ketimpangan pendapatan, kebutuhan layanan publik, dan kebijakan lainnya, lebih berperan dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai keterbatasan pengaruh PDB dan IPM terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik.

Kata kunci: PDB, IPM, Pengeluaran Pemerintah

DOI: <https://doi.org/fasa2701022@gmail.com>

Correspondence: Amanda Enggelia Purba^{1}

Email: angelidita24@gmail.com

Received: 10-10-2024

Accepted: 11-11-2024

Published: 06-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

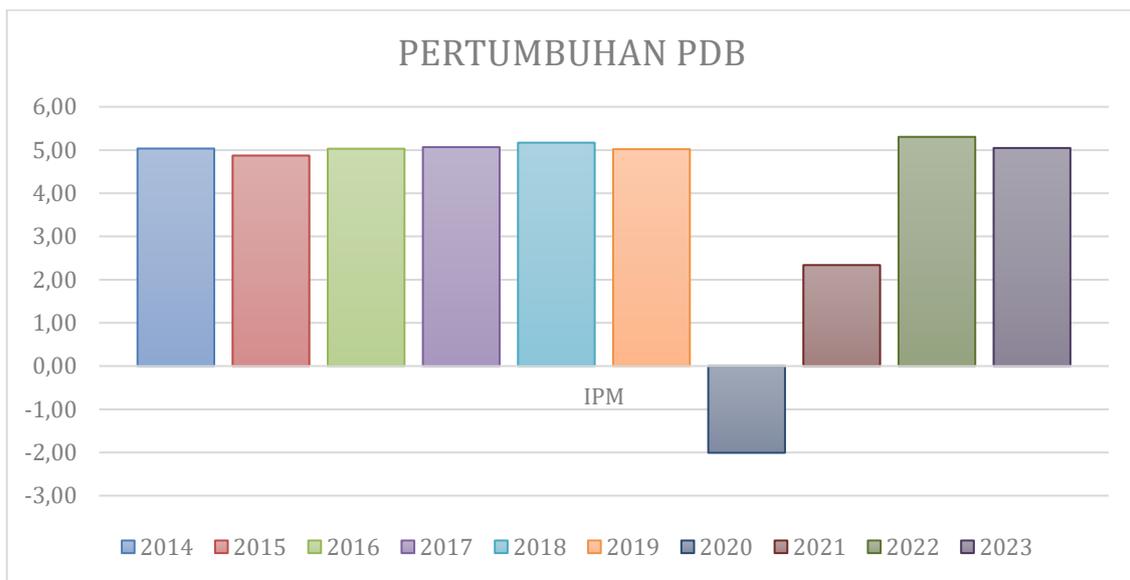
Abstract: This study aims to analyze the impact of government expenditure on Gross Domestic Product (GDP) and the Human Development Index (HDI) in Indonesia during the period of 2014-2023. Government expenditure is one of the fiscal policy instruments aimed at promoting economic growth and human development. GDP, which reflects the total value of goods and services produced, and HDI, which measures the quality of human development, are two key indicators used to assess the impact of government expenditure on the economy and societal welfare. This research employs a quantitative method with annual data and Partial Least Squares (PLS) analysis to examine the relationships between government expenditure, GDP, and HDI. The findings indicate that government expenditure has no significant effect on GDP and HDI. Although government expenditure plays a role in the economy, its impact on GDP and HDI is relatively limited. This suggests that other factors, such as income inequality, public service demands, and other policies, play a more significant role in determining the level of government expenditure. This study provides insights into the limitations of the influence of GDP and HDI on government expenditure in Indonesia, which should be considered in fiscal policy planning and public financial management.

Keywords: GDP, HDI, Government Expenditure

Pendahuluan

Pemerintah menjadi tokoh kunci bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi melalui berbagai kebijakan, termasuk pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal (Sukirno, 2004), yaitu kegiatan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara memutuskan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam APBN. Pemerintah diharapkan memberikan stimulus positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan PDB.

Belanja pemerintah juga diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belanja pemerintah untuk layanan tertentu dapat menghasilkan pengganda ekonomi melalui permintaan agregat. Oleh karena itu, pemerintah harus berkontribusi, salah satu caranya adalah melalui belanja pemerintah.



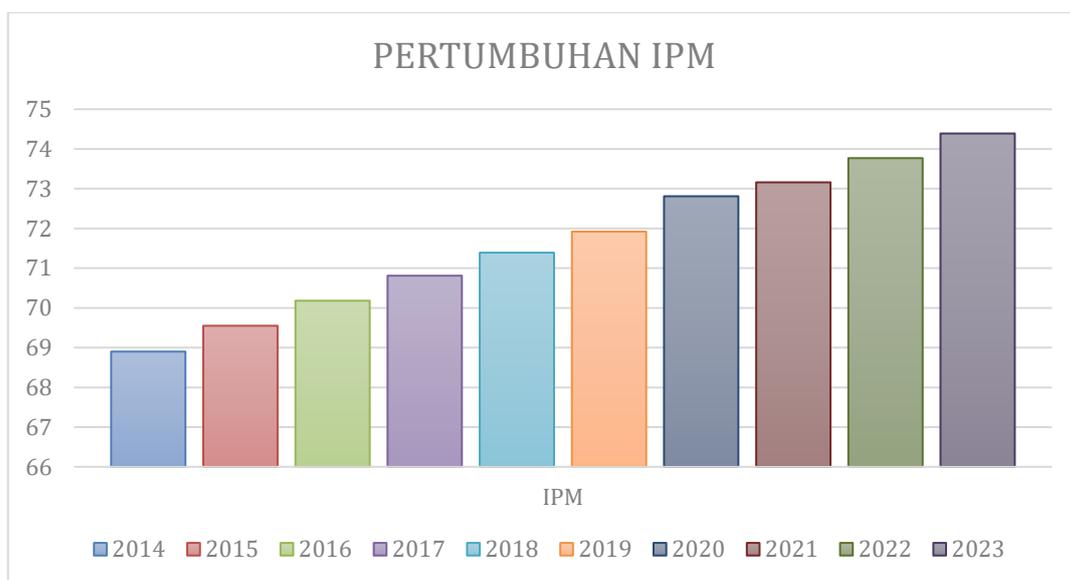
Gambar 1 Product Domestic Bruto Priode (PDB) Periode 2014/2023(%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Laju pertumbuhan PDB Indonesia secara triwulanan sejak tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan kecenderungan stabil, namun pada tahun 2020 mulai menurun tajam hingga mencapai -2%. Penurunan ini disebabkan oleh munculnya Covid-19 dan situasi ekonomi global yang belum membaik pada saat itu, sedangkan pada tahun 2021 mulai meningkat secara bertahap hingga pada tahun 2023 tampak kembali stabil.

Salah satu indikator yang dapat membantu mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara maju atau berkembang adalah tingkat persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dijabarkan sebagai alat ukur pencapaian

kualitas pembangunan manusia untuk kehidupan yang lebih baik, yang memungkinkan akses terhadap capaian pembangunan yang terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Ginting dkk (2008), sumber daya pembangunan seharusnya tidak lagi berfokus pada kekuatan sumber daya alam, tetapi lebih mengutamakan sumber daya manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia diperlukan oleh pemerintah.



Gambar 2 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Priode 2014-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat IPM di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023 terpantau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, nilai IPM rata rata tumbuh sebesar 0,69%, dan pada periode berikutnya dari tahun 2020 hingga 2023, nilai IPM rata-rata meningkat lagi menjadi 0,72%. Hal ini menunjukkan bahwa IPM di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap kurun waktu.

Inflasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan, bukan hanya pada satu jenis barang tertentu, dan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu . Ketika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri juga akan ikut meningkat. Inflasi senantiasa menjadi topik pembahasan, terutama terkait dampak dan pengaruhnya yang luas terhadap agregat ekonomi makro di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga. Menurut Abarca dkk. (2021), suatu keadaan dapat dikatakan inflasi apabila meliputi tiga komponen, yaitu kenaikan harga, penerapan

secara umum, dan kontinuitas. Berdasarkan Anoraga (2007: 165), kenaikan harga suatu komoditas tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga secara keseluruhan.

Mengingat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan IPM.

TEORI

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal (Sukirno, 2004), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan menetapkan tingkat pendapatan dan pengeluaran pemerintah tahunan yang dapat dilihat dalam dokumen APBN tingkat nasional dan APBD tingkat daerah. Kebijakan fiskal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan nilai output dan prospek lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

Seluruh jumlah produk dan jasa yang diproduksi di dalam negeri oleh sumber daya produksi dalam negeri dan luar negeri dalam satu tahun tertentu dikenal sebagai produk domestik bruto, atau PDB. Rahardja dan Manurung (2008:12) mendefinisikan PDB sebagai jumlah total barang dan jasa jadi yang diproduksi oleh suatu perekonomian selama periode waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya produksinya sendiri, sebagaimana ditentukan oleh harga pasar. Menurut metode pengeluaran, sejumlah faktor, seperti belanja pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga, memengaruhi ukuran PDB. Pertumbuhan ekonomi tahunan dianalisis menggunakan harga konstan. Dengan kata lain, harga menentukan nilai PDB.

3. IPM

Salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada tiga komponen yang digunakan dalam penyusunan IPM. Ketiga faktor tersebut, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah faktor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam konteks pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya, IPM menggambarkan bagaimana pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. UNDP pertama kali menggunakan metrik ini pada tahun 1990, dan kini secara rutin dimasukkan dalam Laporan Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahun. Salah

satu metrik penting untuk menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah IPM. Tingkat persentase nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk negara maju atau negara berkembang.

Salah satu cara untuk menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai alat untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup seseorang dan memperoleh akses terhadap hasil pembangunan di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum tentang hubungan antara belanja pemerintah terhadap PDB dan IPM, penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan data tahunan dengan observasi selama periode sepuluh tahun dari tahun 2014 hingga 2023. Perangkat lunak SmartPLS yang berjalan di komputer digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Analisis persamaan struktural dari pemodelan persamaan struktural, PLS (Partial Least Square) didasarkan pada variasi yang melakukan pengujian instrumen dan pengujian model struktural secara bersamaan.

Model dalam SEM

1. Model Pengukuran (Outer Model)

Model luar, juga dikenal sebagai model pengukuran, menjelaskan hubungan antara setiap blok indikator dan variabel latennya (Ghozali dan Latan, 2020:67). Validitas konstruk dan reliabilitas instrumen diuji menggunakan model luar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat mengukur apa yang harus dinilai, apakah alat ukur tersebut konsisten dalam mengukur suatu konsep, atau apakah responden konsisten dalam menjawab pertanyaan kuesioner atau instrumen penelitian. Ghozali dan Latan (2020:68) menyatakan bahwa uji validitas adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan model pengukuran.

a. Uji Validitas

Validitas kuesioner dinilai menggunakan uji validitas. Menurut Ghozali dan Latan (2020), kuesioner atau instrumen dianggap valid jika pertanyaannya dapat memberikan informasi yang akan digunakan kuesioner untuk mengukur. Nilai r hitung dan nilai r tabel dibandingkan untuk melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi koefisien korelasi biasanya dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 untuk memastikan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Jika suatu item memiliki korelasi substansial dengan skor keseluruhan, maka item tersebut dianggap sah. Item, pertanyaan, atau variabel dianggap valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dan

nilainya positif. Sebaliknya, item, pertanyaan, atau variabel dianggap tidak valid jika r hitung lebih kecil dari r tabel.

2. Model Struktural (Inner Model)

Ghozali dan Latan (2020:73) menyatakan bahwa model struktural atau yang juga dikenal dengan nama inner model menjelaskan kekuatan estimasi atau hubungan antara variabel laten atau konstruk yang dibangun menggunakan ide inti teori. Untuk meramalkan hubungan kausal antara variabel laten, inner model merupakan model struktural. Tujuan evaluasi model struktural adalah untuk menentukan bagaimana variabel laten saling berhubungan. Dengan memeriksa beberapa indikasi, khususnya:

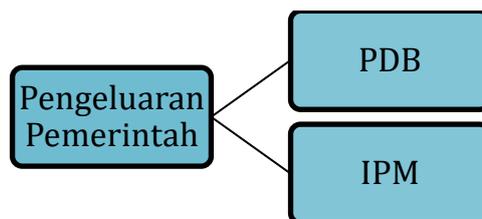
a. Path Coefficient

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Hal ini dapat dilihat dari derajat signifikansinya. Rentang koefisien jalur berada di antara 1 dan -1; semakin mendekati 1 atau -1, semakin kuat hubungannya (Ghozali dan Latan, 2020:80).

b. Goodness of Fit Index (GoF)

Digunakan untuk memberikan bentuk dasar pengukuran untuk model prediksi yang lengkap dan untuk menilai model pengukuran dan struktural (Ghozali & Latan, 2020:82). Kinerja model pengukuran dan model struktural secara bersama-sama divalidasi oleh indeks GoF, yang merupakan metrik tunggal.

Deskriptif



Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von Mises p value
X1	1	MET	0	1.635.100	2.014.000	-803.000	2.122.000	-803.000	2.122.000	876.534	6.377	-2.524	0.000
X2	2	MET	0	6.548.700	7.192.000	689.000	7.439.000	689.000	7.439.000	1.958.846	9.843	-3.128	0.000
Y	3	MET	0	2.547.000	1.373.000	166.000	10.000.000	166.000	10.000.000	2.823.967	4.513	2.082	0.006

Gambar 3 Statistic Descriptive

Sumber : Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat dipahami bahwa nilai p Cramer-von Mises < 0,05 menunjukkan bahwa hasil perhitungan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Model Pengukuran (Outer Model)

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

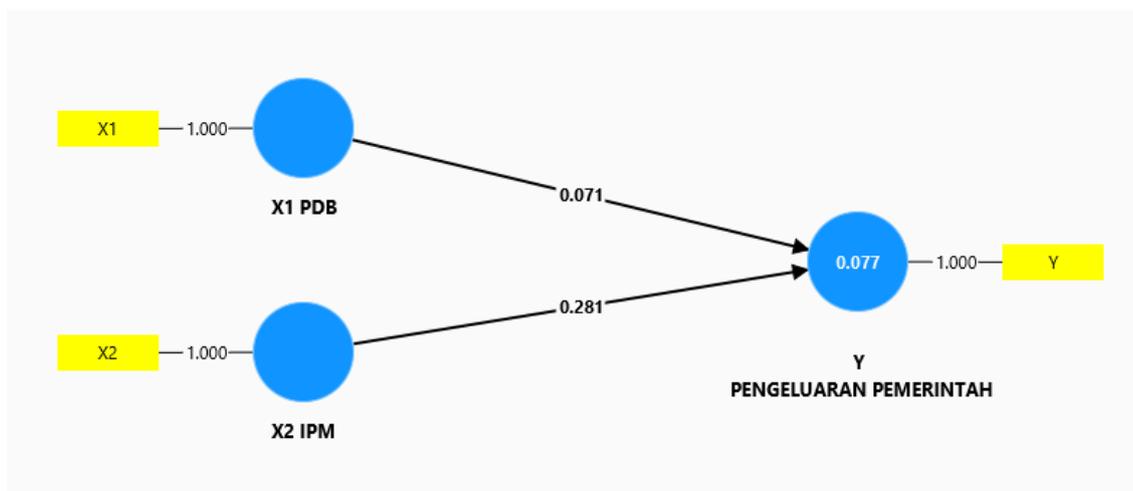
Vaiabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Keterangan
PDB	X1	1.000	0.5	Valid
IPM	X2	1.000	0.5	Valid
Pengeluaran Pemerintah	Y	1.000	0.5	Valid

Sumber: Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan tabel 1, dari hasil uji validitas ini dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Hal ini dinyatakan valid dengan diketahui bahwa semua nilai setiap variabel laten telah mencapai 0,5 atau lebih besar dari rata-rata 0. 5, dan nilai AVE setiap variabel melampaui ambang batas rata-rata 0,5.

Uji Model Struktural

1. Path Coefficients



Gambar 4 Nilai Loading Factor

Sumber : Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan Gambar 4 di atas, nilai faktor pemuatan mengacu pada nilai faktor

pemuatan pada variabel laten beserta indikatornya. Nilai faktor pemuatan harus lebih besar dari 0,70. Menurut Haryono (2017:372), nilai faktor pemuatan $\geq 0,7$ dianggap ideal, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut valid untuk mengukur konstruk yang dibentuknya. Dalam pengalaman penelitian empiris, nilai faktor pemuatan $\geq 0,5$ masih diperbolehkan, dan beberapa ahli bahkan menerima angka 0,4. Oleh karena itu, nilai faktor pemuatan $\leq 0,4$ harus dikeluarkan dari model.

Tabel 2. Path Coefficients

	Sampel Asli (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T_statistics (IO/STDEV)	P values
X1 PDB -> Y_PENGELUARAN PEMERINTAH	0.071	0.064	0.351	0.202	0.840
X2 IPM -> Y_PENGELUARAN PEMERINTAH	0.281	0.493	0.327	0.859	0.390

Sumber: Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan tabel 2 koefisien jalur diatas dapat dipahami sebagai berikut :

1. Variabel PDB (X1) terhadap Belanja Pemerintah (Y) sebesar 0,071, dengan nilai p sebesar 0,840. Hal ini menunjukkan bahwa PDB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pemerintah.
2. Sedangkan variabel IPM (X2) terhadap Belanja Pemerintah (Y) sebesar 0,281 dengan nilai p sebesar 0,390. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pemerintah..

Goodness of Fit Index (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kepraktisan dan ketepatan suatu model sebagai suatu kesatuan utuh yang berfungsi sebagai validasi dalam PLS-SEM. Standar yang digunakan adalah nilai 0,10 (GoF kecil), 0,25 (GoF sedang), dan nilai 0,36 (GoF besar) (Ghozali dan Latan , 2015).

1. Uji Model Fit

Agar model memenuhi standar kesesuaian model, nilai SMSR harus di bawah 0,05. Meskipun demikian, menurut informasi dari situs SMARTPLS, batasan atau kriteria kesesuaian model terdiri dari: Nilai SRMR atau Standardized Root Mean Square <0,10 atau < 0,08.

Tabel 3 Uji Model Fit

	SATURATED MODEL	ESTIMATED MODEL
SRMR	0.000	0.000
d_ ULS	0.000	0.000
d_ G	0.000	0.000
Chi-square	0.000	0.000
NFI	1.000	1.000

Sumber: Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan tabel 4.6 Nilai SRMR atau Standardized Root Mean Square, adalah 0,000 < 0,10 maka model yang digunakan adalah fit.

R Square

Tabel 4 Hasil Nilai R Square

	R_square	R_square adjusted
Y_PENGELUARAN PEMERINTAH	0.077	(0.186)

Sumber: Data diolah, 2024 (Output data Smartpls 4.0)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar (0,186) sekitar -18,6% dan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,077 sekitar 7,7 %, hal ini menunjukkan bahwa model regresi masih kurang memiliki daya penjas yang moderat terhadap fluktuasi variabel belanja pemerintah..

Pembahasan

1. Uji hipotesis pertama: PDB tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah

Berdasarkan hasil uji data, nilai p adalah 0,840 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pemerintah, karena jika dievaluasi secara ekonomi, PDB hanya mencerminkan nilai total barang dan jasa, sedangkan belanja pemerintah dapat memengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian.

PDB memiliki beberapa kendala, antara lain: Tidak mempertimbangkan distribusi pendapatan, Tidak memperhitungkan kualitas hidup masyarakat, Mengabaikan ekonomi informal, Tidak memperhitungkan dampak lingkungan, Mengabaikan kegiatan nonekonomi. Belanja pemerintah dapat berdampak pada sektor

produksi barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanja pemerintah juga dapat berdampak positif terhadap pendapatan nasional Indonesia.

2. Pengujian hipotesis kedua: HDI tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah

Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai p adalah $0,390 > 0,05$. Hal ini berarti IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pemerintah, karena jika dianalisis secara ekonomi, terdapat faktor lain yang lebih krusial dalam menentukan belanja pemerintah, seperti: Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pemerintah, Meningkatnya penyediaan layanan pemerintah, Meningkatnya inefisiensi dalam pemberian layanan.

IPM sendiri menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan menyeluruh di suatu wilayah. IPM mempengaruhi beberapa aspek, antara lain: Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan pendapatan antar wilayah, Tingkat pengangguran terbuka.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak PDB terhadap Pengeluaran Pemerintah:
2. Variabel PDB (X1) tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap belanja pemerintah, data yang diolah valid dan sesuai namun belum menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja pemerintah.
3. Pengaruh HDI terhadap Pengeluaran Pemerintah:
Variabel IPM (X2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, data yang diolah valid dan sesuai namun belum menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengeluaran pemerintah.
4. Nilai (0,186) sekitar -18,6% dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,077 sekitar 7,7% menunjukkan bahwa model regresi masih kurang mempunyai daya penjas yang moderat terhadap variasi variabel pengeluaran pemerintah.

Referensi

- Abarca, Roberto Maldonado. 2021. "Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru." *Nuevos sistemas de comunicación e información*(1): 2013–15.
- Anoraga, P. (2007). Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id> diakses tgl 21 November 2024.
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan. Smart PLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang
- Ghozali, Imam., & Latan, H. (2020). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan. Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 (2nd ed.)

-
- Gintinged al, 2008. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Moleong , J Lexy 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja
- Rahardja *Prathama*, Manurung Mandala, 2008, Pengantar Ilmu Ekonomi. (Mikroekonomi dan Makroekonomi) Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit. Fakultas. Ekonomi.
- Rosdakarya. Nazir, M. 2014. Metode Penelitian: Cetakan ke 10. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT Raja. Grafindo. Persada.